

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Renja Kecamatan Pungging dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Ranwal Renja disusun. Proses perubahan ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pungging pada Tahun 2025 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2. Review terhadap Perubahan RKPD | 9 |
| 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 10 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 | |
| 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025..... | 11 |
| 3.2. <i>Tagging</i> Tematik..... | 11 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1. Catatan Penting | 12 |
| 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan | 12 |
| 4.3. Rencana Tindak Lanjut | 12 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Pungging Nomor : 188/28/416-306/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 pada Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.
33. Surat Keputusan Camat Pungging Nomor : 188.45/47.1/416-306/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pungging Tahun 2025.
34. Surat Keputusan Camat Pungging Nomor : 188.45/58.1/416-306/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pungging Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

3.2. *Tagging* Tematik

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pungging sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.739.236.000,00 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 621.568.858,00 atau 22,69% sedangkan realisasi kinerja 22,58% (kategori sedang). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Lingkungan Kabupaten Kecamatan Pungging
2025

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah) | | Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024) | | Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi | | Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas) | | Realisasi Kinerja Pada triwulan | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja) | | Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Total Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan | | Total Realisasi dan Anggaran sampai dengan triwulan | | Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|----------------|---|---------------|---|--------------|--|------|---------------------------------|--------------|---|--------------|--|---------------|--|-------|--|--|------|---|------|--|--------------------|----------|---|---------------|---------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | I | R | I | R | | | | | | | | I | R | I | R | Kuantitas (%) | Predikat Penilaian | Kualitas | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 12 | | 16 | | 22 | 23 | 24 | 22 | | 26 | | I | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | K | R | Keterangan | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | | IKM Kecamatan (indeks) | | | | | 84,00 | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pungging | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | [PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan (%) | | 250.000.000,00 | | 94.691.600,00 | 100,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | | 96.891.600,00 | | 38,76 | Kecamatan Pungging | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | SANGAT RENDAH | SANGAT RENDAH | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 3 | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pela yanan) | | 250.000. 000,00 | 94.691.6 00,00 | 80 0,0 0 | 6.200.00 0,00 | 20 0,0 0 | 0, 0 0 | 27 5,0 0 | 220000 0 | 27 5,0 0 | 2.200.0 00,00 | 96.891.6 00,00 | 38 ,7 6 | Keca matan Pungg ing | 20 0,0 0 | 0, 0 0 | 27 5,0 0 | 2.200.0 00,00 | 13 7,5 0 | 0, 0 0 | SAN GAT TIN GGI | SAN GAT REN DA H | - |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04. 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan) | | | | 8,0 0 | 6.200.00 0,00 | 2,0 0 | | 2,0 0 | 2.200.0 00,00 | 2,0 0 | 2.200.0 00,00 | | | Keca matan Pungg ing | 2,0 0 | | 2,0 0 | 2.200.0 00,00 | 10 0,0 0 | 0, 0 0 | SAN GAT TIN GGI | SAN GAT REN DA H | - |
| 2 | [PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%) | | 1.900.00 0.000,00 | 749.027. 050,00 | 10 0,0 0 | 173.930. 900,00 | 0,0 0 | 0, 0 0 | 0,0 0 | 32.578. 000,00 | 0,0 0 | 40.358. 000,00 | 789.385. 050,00 | 41 ,5 5 | Keca matan Pungg ing | 0,0 0 | 0, 0 0 | 0,0 0 | 32.578. 000,00 | 0,0 0 | 0, 0 0 | SAN GAT REN DA H | SAN GAT REN DA H | - |
| 3 | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitasi) | | 1.900.00 0.000,00 | 749.027. 050,00 | 23, 00 | 173.930. 900,00 | 5,0 0 | 0, 0 0 | 5,0 0 | 325780 00 | 5,0 0 | 40.358. 000,00 | 789.385. 050,00 | 41 ,5 5 | Keca matan Pungg ing | 5,0 0 | 0, 0 0 | 5,0 0 | 32.578. 000,00 | 10 0,0 0 | 0, 0 0 | SAN GAT TIN GGI | SAN GAT REN DA H | - |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan | | | | 8,0 0 | 8.720.00 0,00 | 2,0 0 | | 2,0 0 | 5.968.0 00,00 | 2,0 0 | 6.268.0 00,00 | | | Keca matan Pungg ing | 2,0 0 | | 2,0 0 | 5.968.0 00,00 | 10 0,0 0 | 0, 0 0 | SAN GAT TIN GGI | SAN GAT REN DA H | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|--------|---------------|-------|------|-------|--------------|-------|---------------|----------------|-------|--|--------------------|-------|------|--------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---|
| 4 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan) | | | | 12,00 | 13.404.480,00 | 3,00 | | 3,00 | 2.234.080,00 | 3,00 | 5.585.200,00 | | | | Kecamatan Pungging | 3,00 | 3,00 | 2.234.080,00 | 100,00 | 0,00 | SANGAT TINGGI | SANGAT RENDAH | - | |
| 3 | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%) | | 618.049.972,00 | 333.097.942,00 | 100,00 | 50.148.600,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 7540000 | 25,00 | 13.710.000,00 | 346.807.942,00 | 56,11 | | Kecamatan Pungging | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 586.790.858,00 | 100,00 | 0,00 | SANGAT TINGGI | SANGAT RENDAH | - |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit) | | | | 2,00 | 37.898.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.940.000,00 | 0,00 | 11.910.000,00 | | | | Kecamatan Pungging | 0,00 | 0,00 | 6.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | SANGAT RENDAH | SANGAT RENDAH | - | |
| 4 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit) | | | | 3,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | | | Kecamatan Pungging | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | SANGAT RENDAH | SANGAT RENDAH | - | |

| | | pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | [Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Peringkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan dengan target kinerja 100% . Pada triwulan I Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.
Didalam program tersebut ada 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan .
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat , Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sangat Tinggi , dengan Target Kinerja Triwulan I sebesar 200 Pelayanan terelasisasi 275 Pelayanan.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sangat Tinggi, dengan target Kinerja pada Triwulan I adalah 2 laporan dan terealisasi 2 laporan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100%. Pada triwulan I Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.
Pada program tersebut terdapat 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah sangat Tinggi , dengan target Kinerja 5 Fasilitasi sudah terealisasi 5 Fasilitasi.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa, Capaian Kinerja pada Triwulan I Sangat Tinggi , hal ini dikarenakan dari target 2 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua.
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Capaian Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Tinggi, hal ini dikarenakan dari target 2 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu kegiatan Musrenbang dan Kegiatan Koordinasi Bidang Pembangunan.
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian Kinerja Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan Belum adanya pelaksanaan kegiatan.

- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah sangat Tinggi dengan target 1 Kegiatan di Triwulan I sudah terlaksananya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan Koordinasi Bidang Kemasyarakatan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan target 82,5 (A), Capaian Kinerja pada Triwulan I masih belum dapat diukur hal ini dikarenakan Penilaian SAKIP masih belum dilaksanakan. Pada program tersebut ada 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja adalah Persentase Indikator program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target, Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perangkat Daerah, Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi, semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 2 Dokumen tersusunnya Rancangan Awal Renja 2026 dan Rancangan Renja 2026.
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi , semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 7 Dokumen tersusunnya 3 Laporan Realisasi Anggaran , 1 Laporan LKjIP , 1 Laporan Keuangan , 1 Laporan LKPJ , 1 Perjanjian Kinerja.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 95,90% pada Triwulan I ini masih tercapai 22,64% dengan predikat Penilaian Sangat Tinggi.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN, pada Triwulan ini Capaian Kinerjanya Sangat Tinggi dikarenakan semua ASN Kecamatan Pungging telah menerima gaji sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan. Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Tinggi dengan target kinerja 25% terealisasi sebesar 25%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Paket.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 1 Paket.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Dokumen.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Tinggi dengan target kinerja 25% terealisasi sebesar 25% yang terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 6 Laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik, pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan Kendaraan Dinas Kecamatan Pungging kebanyakan terealisasi di akhir tahun.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Rendah dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu:

- a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:
- a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pungging;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (TC-29) Kabupaten Mojokerto

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|---|--|---------|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 77,5 | | n/a | n/a | n/a | n/a | 81 | 82 | 101,23 |
| | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | 100 % | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 21 Laporan | 21 Laporan | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | 94,50% | | n/a | n/a | n/a | n/a | 93,15% | 95,81% | 102,85 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 22 | Orang/Bulan | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 Orang | 22 Orang | 100,00 |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah | 87 | | n/a | n/a | n/a | n/a | 87,50 | 87,50 | 100,00 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 22 | orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 Orang | 22 Orang | 100,00 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | 100% | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 Paket | 1 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 2 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 Paket | 12 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 12 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | 2 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 100 % | | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 24 | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 Laporan | 24 Laporan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00 |
| 7.01.01.2.09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi | 100 | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.01.2.09.01 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | 2 | Paket | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 Paket | 2 Paket | 100,00 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100 | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 3 | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 Unit | 3 Unit | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 7.01.01.2.09.02 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 Unit | 3 Unit | 100,00 |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 10 | Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 Unit | 10 Unit | 100,00 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 100 | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 | 100,00 |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 750 | Pelayanan | n/a | n/a | n/a | n/a | 800 Pelayanan | 1.000 Pelayanan | 128,56 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan | 26 | Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 26 Laporan | 26 Laporan | 100,00 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | 100 | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 100% | 100,00 |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat | 23 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 DOKumen | 23 DOKumen | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|---------------|
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 8 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 | Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00 |

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjang melalui 8 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.559.105.100,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 586.790.858,00 atau sebesar 22,92%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditunjang melalui 1 Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di Sub Kegiatan. Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 6.200.000,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 2.200.000,00 atau sebesar 35,48%.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditunjang melalui 1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di beberapa di Sub Kegiatan.

Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 173.930.900,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 32.578.000,00 atau sebesar 18,73%.

2.2. Review Terhadap Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.”

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kecamatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;. Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 3.053.736.000,00 yang bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

| NO | APBD 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan APBD 2025) | | | | | Ca ta n Pe nt in g |
|----|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pungging | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2 Inovasi | 2.559.105.100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Pungging | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2 Inovasi | 2.550.505.700 | |
| | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82,50 (A) | | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82,50 (A) | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | 100 % | 5.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | 100 % | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|----------------|----------------------|--|---------------------------|--|----------------|----------------------|--|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 2.500.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 Laporan | 2.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 Laporan | 2.500.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | 95,90 % | 2.297.905.700 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | 95,90 % | 2.297.905.700 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pungging | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | 2.297.905.700 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pungging | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang/bulan | 2.297.905.700 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | 100 % | 118.646.320 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | 100 % | 110.046.920 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.792.100 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.792.100 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 12.159.800 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.560.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------|-------------------|---|---------------------------|---|--------------|-------------------|--|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 50.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 50.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.155.220 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.155.220 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.939.200 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 4.939.200 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kecamatan Pungging | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12.600.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12.600.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 100 % | 87.404.480 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 100 % | 87.404.480 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|-------------|-------------------|---|---------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 74.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 74.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 13.404.480 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 13.404.480 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100% | 50.148.600 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Pungging | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 100% | 50.148.600 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Pungging | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 37.898.600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Pungging | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 37.898.600 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Pungging | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 7.500.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Pungging | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 7.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|--------------------|--|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pungging | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 4.750.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Pungging | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 4.750.000 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pungging | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 100 | 6.200.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Pungging | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 100 | 6.200.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Pungging | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 1.000 Pelayanan | 6.200.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Pungging | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 1.000 Pelayanan | 6.200.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 8 Laporan | 6.200.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kecamatan Pungging | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 8 Laporan | 6.200.000 | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan Pungging | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti | 100% | 173.930.900 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kecamatan Pungging | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti | 100% | 481.420.300 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 23 Fasilitasi | 173.930.900 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 24 Fasilitasi | 481.420.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--|-----------|----------------------|--|--------------------|--|-----------|-------------------------|--|
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 8 Dokumen | 8.720.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 8 Dokumen | 14.459.400 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 Dokumen | 36.370.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 Dokumen | 29.220.000 | |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 Dokumen | 38.795.200 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6 Dokumen | 337.695.200 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 Dokumen | 90.045.700 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Pungging | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 Dokumen | 100.045.700 | |
| JUMLAH | | | | | 2.739.236.000 | | JUMLAH | | | 3.046.385.400,00 | |

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Pungging melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Pungging secara langsung melainkan membantu untuk manampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|-----|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Pungging sampai dengan Tribulan I yang masih rendah, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pungging untuk Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Pada Perubahan rencana Kerja 2025 ada beberapa penambahan dan pengurangan anggaran di beberapa Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semula Rp. 12.159.800,00 berkurang (di geser) ke sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sebesar Rp. 8.259.400,00
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan bertambah (geser) sebesar Rp. 8.259.400,00 dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada:
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ada penambahan (geser) anggaran sebesar Rp. 7.150.000,00 dari sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan penambahan (geser) Rp. 5.950.000,00 dari sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada penambahan anggaran sebesar Rp. 304.500.000,00 dimana akan dipergunakan untuk Anggaran Wawasan Kebangsaan dan juga penambahan Honorarium Tim Forkopimca

Kecamatan Pungging dan juga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ada tambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Pleno PKK dan Pemulasaraan Jenazah.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pungging Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel T-C. 31
Rencana Kerja dan Pendanaan P-Renja Tahun 2025

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | | Tambah/Kurang | Sumber Dana |
|------|---|--|---------------|------------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | APBD | APBD EFISIENSI | P-APBD | APBD | APBD EFISIENSI | P-APBD | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| | KECAMATAN PUNGGING | | | | | | 2.747.036.000,00 | 2.739.236.000,00 | 3.046.385.400,00 | 307.149.400,00 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kec. Pungging | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 2.556.505.100,00 | 2.559.105.100,00 | 2.550.505.700,00 | (8.599.400,00) | APBD |
| | | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | 2 inovasi | 2 inovasi | 2 inovasi | | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | Kec. Pungging | 100% | 100% | 100% | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pungging | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Pungging | 21 Laporan | 21 Laporan | 21 Laporan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | Kec. Pungging | 95,90% | 95,90% | 95,90% | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 | 0,00 | APBD |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Kec. Pungging | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 | 0,00 | APBD |
|--|-----------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | Kec. Pungging | 85% | 85% | 85% | 116.046.320,00 | 118.646.320,00 | 110.046.920,00 | (8.599.400,00) | APBD |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Kec. Pungging | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 8.792.100,00 | 8.792.100,00 | 8.792.100,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Pungging | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 12.159.800,00 | 12.159.800,00 | 3.560.400,00 | (8.599.400,00) | APBD |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Kec. Pungging | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Kec. Pungging | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 15.155.220,00 | 15.155.220,00 | 15.155.220,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | Kec. Pungging | 112 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.939.200,00 | 4.939.200,00 | 4.939.200,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Kec. Pungging | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Pungging | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | Kec. Pungging | 100% | 100% | 100% | 87.404.480,00 | 87.404.480,00 | 87.404.480,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Kec. Pungging | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 0,00 | APBD |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Kec. Pungging | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.404.480,00 | 13.404.480,00 | 13.404.480,00 | 0,00 | APBD |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Kec. Pungging | 100% | 100% | 100% | 50.148.600,00 | 50.148.600,00 | 50.148.600,00 | 0,00 | APBD |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Kec. Pungging | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 37.898.600,00 | 37.898.600,00 | 37.898.600,00 | 0,00 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | Kec. Pungging | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | APBD |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kec. Pungging | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | APBD |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | Kec. Pungging | 100% | 100% | 100% | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 14.459.400,00 | 8.259.400,00 | APBD |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | Kec. Pungging | 1.000 Pelayanan | 1.000 Pelayanan | 1.000 Pelayanan | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 14.459.400,00 | 8.259.400,00 | APBD |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan | Kec. Pungging | 8 Laporan | 8 Laporan | 8 Laporan | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 14.459.400,00 | 8.259.400,00 | APBD |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | Kec. Pungging | 100% | 100% | 100% | 184.330.900,00 | 173.930.900,00 | 481.420.300,00 | 307.489.400,00 | APBD |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | Kec. Pungging | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 24 Dokumen | 184.330.900,00 | 173.930.900,00 | 481.420.300,00 | 307.489.400,00 | APBD |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pungging | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 11.720.000,00 | 8.720.000,00 | 21.810.000,00 | 13.090.000,00 | APBD |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Pungging | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 39.970.000,00 | 36.370.000,00 | 29.220.000,00 | (7.150.000,00) | APBD |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pungging | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6 Dokumen | 40.595.200,00 | 38.795.200,00 | 337.695.200,00 | 298.900.000,00 | APBD |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Pungging | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 92.045.700,00 | 90.045.700,00 | 100.045.700,00 | 10.000.000,00 | APBD |

3.2. Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun daftar tagging subkegiatan dilingkup Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | ANGGARAN PERUBAHAN 2025 | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------------------------|-----------------|-----|----------|-------------------|-------|--------|--------|-------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | KABU PATEN LAYAK ANAK | KABUPATEN SEHAT | SPM | STUNTING | KEMISKINAN EKSREM | SDG'S | RANHAM | GENDER | KUMUH | INFRASTRUKTUR | VISI MISI | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN PUNGGING | | | | | | | | | | | | 3.046.385.400,00 | 3.046.385.400,00 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 2.550.505.700,00 | 2.550.505.700,00 |
| | | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | | | | | | | | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | | | | | | | | | | | 2.297.905.700,00 | 2.297.905.700,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | | | | | | | | | | | 110.046.920,00 | 110.046.920,00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | 8.792.100,00 | 8.792.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | 3.560.400,00 | | | 3.560.400,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | | | | | | | 50.000.000,00 | | | 50.000.000,00 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | | | | | 15.155.220,00 | | | 15.155.220,00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | | | | | | | | 4.939.200,00 | | | 4.939.200,00 |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | | | | | | | | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | 12.600.000,00 | | | 12.600.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | | | | | | | | 87.404.480,00 | | | 87.404.480,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | | | | | | | | 74.000.000,00 | | | 74.000.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | | | | | | | | 13.404.480,00 | | | 13.404.480,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | | | | | | | | 50.148.600,00 | | | 50.148.600,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | | | 37.898.600,00 | | | 37.898.600,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | | | | | | | | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | | | | 4.750.000,00 | | | 4.750.000,00 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | | | | | | | | 14.459.400,00 | | | 14.459.400,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | | | 14.459.400,00 | | | | | 14.459.400,00 | | | 14.459.400,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan | | | 14.459.400,00 | | | | | 14.459.400,00 | | | 14.459.400,00 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | | | | | | | | 481.420.300,00 | | | 481.420.300,00 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, | | | | | | | | 481.420.300,00 | | | 481.420.300,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|
| | | kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | 21.810.000,00 | | | 21.810.000,00 |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | 29.220.000,00 | | | 29.220.000,00 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 337.695.200,00 | | | 337.695.200,00 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | 100.045.700,00 | | | 100.045.700,00 |

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pungging Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pungging Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Pungging dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Pungging.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pungging Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
 - b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
 - c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
 - d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
 - e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
 - f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.
-

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pungging Tahun 2025

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pungging Tahun 2025

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- g. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja. Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pungging Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Juni 2025

